

**PENGARUH KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL, IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
PENGAWASAN DPRD, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE**

(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)

Oleh:

**Firdiani Meitia Indeswari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Email:

meitiaindeswari@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to analyze the Influence of Performance of the apparatus of Local Government, Regional Finalcial Management, The Sistem of Internal Control, Implementation of Government Accounting Standards, Oversight Council, and Organizational Culture, Implementation of Good Governance. The subject in this research is the head of Bantul Regency Regional Work Unit (OPD). The sample in this research is 36 respondents were selected using purposive sampling with criteria, only the head of the Regional Work Unit (OPD). Totaling 38 questionnaires were distributed and 36 questionnaires were returned, This data were examined using linear regression models. The analytical tool used is SPSS 15. Based on the analysis that has been carried out the results show that the Performance of the apparatus of local government, regional financial management, implementation of government accounting systems, and oversight council have a positive effect on the implementation of good governance, and the sistem of internal control and organizational culture have no effect on implementation of good governance.

Keywords: Performance of the apparatus of Local Government, Regional Finalcial Management, Oversight Council, Organizational Culture, Implementation of Good Governance.

I. PENDAHULUAN

Konsep *good governance* muncul karena adanya perubahan atau perkembangan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat pada era terjadinya reformasi. Era reformasi yang terjadi secara besar-besaran itu mengakibatkan perubahan hubungan dalam bidang atau konsep politik, ekonomi, serta dalam bidang kelembagaan pemerintahan. Karena adanya perubahan hubungan tersebut maka lahir lah konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bertujuan untuk menuntut transparansi dalam pengelolaan keuangan serta laporan keuangan kepada pemerintah daerah (OPD) untuk rakyat sehingga mewujudkan akuntabilitas publik yang baik dan selaras dengan tujuan penerapan *good governance*.

Pemerintah dikatakan memiliki nilai-nilai yang baik atau *good governance* jika pemerintahan tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai pemerintahan yang Wajar Tanpa Pengecualian dalam opini auditnya. Jika pemerintah sudah dinyatakan sebagai pemerintahan yang Wajar Tanpa Pengecualian maka pemerintahan tersebut dapat benar-benar dinilai dengan baik dan layak sehingga dapat dikatakan sebagai *good governance*. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002).

Salah satu indikasi keberhasilan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan atau anggaran adalah ketika memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian. Dengan penilaian tersebut pemerintah dianggap telah memenuhi kapabilitas, aksebilitas dan terutama akuntabilitas terhadap publik. Untuk mencapai predikat tersebut sebagai upaya telah dilakukan oleh lembaga pemerintahan dalam kerangka reformasi

birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), (www.Bppkpd.id, n.d.).

Bantul sendiri adalah termasuk kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. Kabupaten Bantul pada tahun 2017 dikatakan sebagai kabupaten yang memiliki prestasi tinggi. Pada tahun 2017 kabupaten Bantul mampu mengoleksi 107 piagam penghargaan. Penghargaan tersebut didapatkan dari penghargaan tingkat nasional mendapatkan sebanyak 50 prestasi dan penghargaan di tingkat provinsi sebanyak 57 prestasi.

Selain memiliki prestasi yang tinggi kabupaten Bantul juga memiliki kekurangan yaitu kurangnya kinerja aparatur pemerintah dalam segi pelayanan publik yang masih dirasakan oleh masyarakat kabupaten kota bantul (bantulkab.go.id, n.d.), serta tidak hanya dalam segi pelayanan saja, kabupaten Bantul juga masih memiliki kekurangan yaitu ketidak transparanan dalam pengelolaan anggaran serta pengelolaan laporan keuangan. Pengelolaan keuangan yang tidak transparan ini berhubungan dengan data yang dikeluarkan oleh pihak OPD yang dinilai masih kurang detail dan terperinci. Salah satu contoh dari ketidak transparanan yang dirasakan oleh masyarakat adalah rincian dan pengalokasian uang dari hasil pajak daerah yang masih kurang jelas dan transparan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal (SPI), Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pengawasan DPRD, dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance*”

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* sendiri adalah teori yang merupakan bentuk dari gambaran atas suatu situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan

dan kepentingan individu melainkan lebih memperhatikan dan memperlihatkan suatu hubungan yang erat antara kesuksesan dan keputusan, sehingga tercapainya sebuah kesuksesan dalam suatu organisasi tersebut akan menunjukkan kemaksimalannya dalam utilitas principals dan manajemennya tersebut sehingga dapat terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut (Donaldson & Davis, 1991).

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Dalam penelitian Lestiawan dan Jatmiko (2015), menyatakan bahwa Kinerja Aparatur pemerintah Daerah adalah prestasi kerja individu atau kelompok dalam kurun waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah itu bisa di nilai dari banyaknya prestasi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah tersebut, jika semakin banyak prestasi yang dimiliki dan diimplementasikan maka kinerja aparatur pemerintah dinilai baik. Namun penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah melalui prestasi itu dilihat dalam jumlah kurun waktu tertentu baru dapat di katakan kinerja aparatur pemerintah baik.

Menurut penelitian Dhiyayani (2017), Ruspina (2013), dan Mailoor *et al* (2017) menyatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*. Sesuai dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa jika kinerja aparatur pemerintah daerah dapat diukur dengan baik dan benar dengan melihat seberapa banyak prestasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut maka pemerintah daerah tersebut sudah termasuk dalam *good governance* atau dapat dikatakan sudah menerapkan *good governance*, sehingga dapat diajukan hipotesis pertama sebagai berikut :

H₁ : Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Governance*

Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah menurut Dhiyayani (2017), adalah di maksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggung jawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaan. Dari penjelasan Dhiyayani dapat dikatakan bahwa seharusnya pengelolaan keuangan daerah itu dilaksanakan secara transparan dalam segi penyusunan dan pertanggung jawabannya serta ketepatan sasaran pengelolaan keuangan daerah agar mampu memenuhi keinginan masyarakat tentang konsep transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dalam penelitian Dhiyayani (2017), (Ristanti *et al.*, 2014) serta (Ruspina, 2013) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*. Dengan demikian sesuai hasil dari penelitian terdahulu mengenai pengelolaan keuangan daerah maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabilitas dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah tersebut sudah menerapkan *good governance* dengan baik dan benar sehingga dapat diajukan hipotesis kedua sebagai berikut :

H₂ : Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Governance*

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam Tantriani (2012) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan kegiatan pengendalian yang berfokus atau terutama dari pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi dua hal yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Dari hasil penelitian Ristanti *et al* (2014), Habibie (2013), . Mailoor *et al* (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Dapat disimpulkan Sesuai dengan hasil

penelitian-penelitian sebelumnya bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik pula penerapan *good governance*. sistem pengendalian internal dapat dikatakan baik jika sistem pengendalian internal telah memenuhi lima elemen yang dirancang dan di implementasikan untuk memberi jaminan bahwa sasaran sistem pengendalian internal telah terpenuhi agar terlaksana penerapan *good governance*, maka diajukan hipotesis ke tiga sebagai berikut:

H₃ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Governace*

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Dhiyayani (2017), mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah pedoman umum atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berfungsi sebagai panduan atau pedoman dalam menjalankan prinsip-prinsip tentang sistem yang mengatur perlakuan akuntansi.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu Dhiyayani (2017), Mailoor *et al* (2017) menyatakan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance*, jika implementasi standar akuntansi pemerintah baik maka penerapan *good governance* juga akan baik, implementasi standar akuntansi pemerintah dikatakan baik jika informasi laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik serta didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten maka akan terwujud implementasi standar akuntansi pemerintah yang baik sehingga penerapan *good governance* juga akan tercapai dengan baik. Maka dapat diajukan penurunan hipotesisi yang ke empat sebagai berikut :

H₄ : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Governance*

Pengawasan DPRD

Jika pemerintah daerah memiliki pengawasan DPRD yang baik dan bagus dengan kualitas yang baik maka pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan sudah melakukan penerapan *good governance*. Pengawasan DPRD yang baik dan memiliki kualitas yang bagus jika, pengawasan yang ada berjalan dengan amanah dan jujur tanpa adanya penyelewengan dalam bentuk apapun karena pengawasan termasuk kedalam tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan pelaporan APBD dan pengawasan juga termasuk kedalam salah satu fungsi pokok DPRD. Menurut hasil dari penelitian Habibie (2013), menyatakan bahwa Pengawasan DPRD berpengaruh terhadap *Good Governance*. Maka dapat diajukan hipotesis ke lima sebagai berikut :

H₅ : Pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Governance*

Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah Suatu sistem dan makna yang timbul akibat adanya persepsi yang digunakan dalam suatu organisasi. Wiratno *et al* (2013), Budaya organisasi memiliki beberapa dimensi yaitu : a) perhatian pada rincian, b) orientasi pada hasil, c) orientasi pada orang serta yang keempat adalah d) orientasi pada tim.

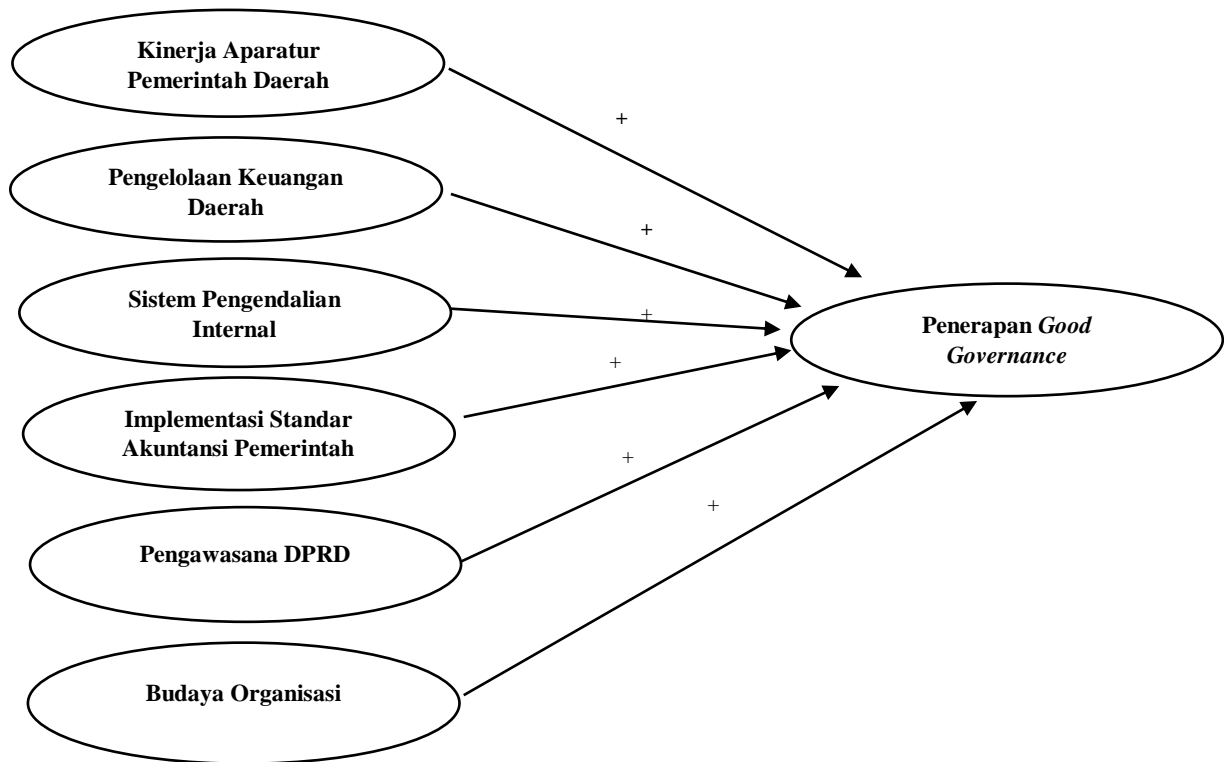
Hasil dari penelitian Syamsir (2014), mengatakan bahwa Budaya Organisasi Daerah Berpengaruh terhadap Penerapan *Good Governance*, namun dalam penelitian Mailoor *et al* (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penerapan *good governance*, dengan adanya perbedaan penelitian sebelumnya maka penelitian ini mengajukan hipotesis ke enam sesuai dengan pernyataan bahwa jika suatu pemerintah daerah memiliki budaya organisasi sebagai sistem yang timbul

karena adanya persepsi yang digunakan dengan baik maka budaya organisasi tersebut sudah menerapkan *good governance*.

Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa budaya organisasi yang baik adalah yang memiliki karakteristik budaya organisasi yang kuat dan dominan yang tidak mementingkan budaya individu pribadi dan terbentuklah sebuah persepsi budaya yang baik, sehingga dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₆ : Budaya Organisasi berpengaruh positif Terhadap Penerapan *Good Governance*

MODEL PENELITIAN



Gambar Model Penelitian 2.1

III. METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini berada di Pemerintah Daerah kabupaten Bantul. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah OPD atau Organisasi perangkat daerah kabupaten Bantul. Sampel yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari OPD yaitu berjumlah 38 OPD yang meliputi Sekertariat Daerah (10), Dinas (19), Badan (6), kantor (2), sekretariat DPRD (1), yang nantinya hanya akan diambil dari perwakilan masing-masing OPD yaitu hanya Kepala Dinas, Kepala badan, Kepala sekretariat daerah, kepala atau bagian sekretariat DPRD, dan kepala Kantor, dengan total sampel sebanyak 38 responden.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer adalah merupakan salah satu teknik pengambilan data secara langsung dengan menggunakan kuesioner, dengan cara penyampaian kuesioner secara langsung kepada responden pada masing-masing OPD Bantul. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode pertanyaan karena metode ini lebih *reliable* dan efektif.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sehingga pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak oleh peneliti melainkan melalui suatu kriteria yang sudah ditentukan yaitu hanya kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul saja.

Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer, yaitu data yang diterima dan diperoleh langsung oleh peneliti dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden yang termasuk dalam kriteria penelitian yang digunakan. Dengan demikian data yang diperoleh langsung oleh peneliti adalah berupa jawaban-jawaban dari reponden yang terdaftar dalam kriteria penyempelan yaitu sebagian dari OPD kabupaten Bantul tentang pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem

pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintah, pengawasan DPRD, dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance*.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data atau sampel yang berhubungan dan yang digunakan dalam penelitian. Sesuai dengan metode yang digunakan untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan metode *survey* dengan menyebarkan kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1) Metode survey

Metode survey digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang karakteristik populasi, seperti kondisi masyarakat berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, suku bangsa, dan etnis. Metode survey dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relative kecil. Populasi tersebut berkenaan dengan orang, instansi, lembaga, dan organisasi.

2) Kuesioner

Teknik pengumpulan data dari kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan mengenai *topic* masalah yang dibahas dalam penelitian atau variabel yang diteliti. Dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan atau diberikan terhadap responden dalam suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis pertanyaan atau kuesioner tertutup, yaitu adalah suatu kuesioner yang dimana respondennya tidak diberi kesempatan untuk menjawab, namun jawaban dari kuesioner penelitian telah disediakan oleh penelitinya, sehingga responden hanya tinggal memilih dari jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti saja.

Dalam kuesioner penelitian ini menggunakan jenis Skala Likert yaitu jenis metode yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial.

Menurut Sekaran dan Bougie (2017) skala likert adalah suatu skala yang dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek menyetujui suatu pertanyaan pada skala lima poin dengan titik panduan (*anchor*).

Dalam skala likert yang digunakan untuk mengukur respon subjek dengan 5 (lima) point skala dengan interval yang sama (Jogiyanto, 2016). Skala yang digunakan yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju

Tabel 3.1
Skala Pengukuran

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Netral	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengambil sampel seluruh Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang dimana hanya diambil Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bantul saja. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan pengambilan kuesioner :

Tabel 4.1
Tingkat Pengambilan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar	38	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	36	94,7%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	2	5,3%
Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat digunakan		94,7%

Sumber : Data Primer

Hasil uji statistik deskriptif variabel penelitian pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Teoritis		Aktual		
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Std. Deviation
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	10 – 50	30	24 – 50	40,56	5,784
Pengelolaan Keuangan Daerah	10 – 50	30	24 – 50	40,53	6,026
Sistem Pengendalian Internal	12 – 60	42	29 – 60	46,03	6,120
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	8 – 40	24	20 – 40	32,00	4,342
Pengawasan DPRD	11 – 55	33	26 – 53	43,36	5,822
Budaya Organisasi	10 – 50	30	24 – 50	38,31	5,366
Penerapan <i>Good Governance</i>	14 – 70	35	32 – 69	55,44	7,105

Sumber : *Output SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas, variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, implementasi standar akuntansi pemerintah, pengawasan DPRD dan budaya organisasi yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tinggi.

Uji Validitas

Hasil uji validitas sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Instrumen

Butir pernyataan	Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (KMO : 0,898)	Pengelolaan Keuangan Daerah (KMO : 0,827)	Sistem Pengendalian Internal (KMO : 0,886)	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (KMO : 0,889)	Pengawasan DPRD (KMO : 0,899)	Budaya Organisasi (KMO : 0,887)	Penerapan Good Governance (KMO : 0,858)	Keterangan
1	.736	.825	.724	.864	.783	.898	.896	Valid
2	.794	.890	.788	.917	.778	.805	.777	Valid
3	.799	.759	.792	.916	.730	.786	.746	Valid

4	.839	.881	.755	.819	.785	.786	.833	Valid
5	.870	.872	.731	.874	.778	.860	.885	Valid
6	.832	.905	.827	.899	.688	.821	.749	Valid
7	.798	.855	.816	.818	.791	.773	.862	Valid
8	.829	.861	.828	.859	.906	.864	.827	Valid
9	.824	.892	.730	-	.931	.842	.843	Valid
10	.816	.888	.799	-	.851	.791	.872	Valid
11	-	-	.848	-	.843	-	.841	Valid
12	-	-	.848	-	-	-	.743	Valid
13	-	-	-	-	-	-	.846	Valid
14	-	-	-	-	-	-	.892	Valid

Sumber : *output SPSS V.15*

Berdasarkan tabel diatas nilai KMO semua variabel diatas 0,5 maka seluruh butir pertanyaan semua variabel dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Hasil uji reabilitas sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.941	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Daerah	.960	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	.945	Reliabel
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.953	Reliabel
Pengawasan DPRD	.946	Reliabel
Budaya organisasi	.947	Reliabel
Penerapan <i>Good Governance</i>	.965	Reliabel

Sumber : *output SPSS V.15*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* seluruh variabel di atas 0,7, maka dapat disimpulkan pernyataan-pernyataan ketujuh variable dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang tinggi.

Uji Normalitas

Berikut hasil uji normalitas antara lain :

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.952

Sumber: *output SPSS V.15*

Berdasarkan tabel diatas uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar 0,952 menunjukkan bahwa masing-masing variabel data penelitian ini mempunyai nilai *Asymp.sig (2-tailed)* diatas 0,05, sehingga variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan mempunyai data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas antara lain :

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistiks	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.298	3.354
Pengelolaan Keuangan Daerah	.217	4.605
1 Sistem Pengendalian Internal	.204	4.896
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.220	4.548
Pengawasan DPRD	.272	3.670
Budaya Organisasi	.227	4.408

a. Dependent Variable: Penerapan Good Governance

Sumber : *output SPSS V.15*

Tabel di atas menjelaskan bahwa data yang ada pada masing-masing variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil ini dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* secara keseluruhan < 10 dan nilai tolerance $> 0,1$, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut hasil uji heteroskedastisitas antara lain :

Tabel 4.7
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Sig.
(Constant)	.737
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.536
Pengelolaan Keuangan Daerah	.296
1 Sistem Pengendalian Internal	.614
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.555
Pengawasan DPRD	.295
Budaya Organisasi	.730

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : *output SPSS V.15*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi secara keseluruhan variabel lebih besar dari 0,05, maka data yang terdapat dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terkena heteroskedastisitas.

Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

Uji Regresi Berganda

Berikut hasil uji regresi berganda antara lain :

Tabel 4.8
Uji Nilai-t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	1.576	3.113	.617
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	.253	.120	.044
Pengelolaan Keuangan Daerah	.378	.135	.009
1 Sistem Pengendalian Internal	.128	.137	.357
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah	.383	.186	.048
Pengawasan DPRD	.430	.125	.002
Budaya Organisasi	-.223	.148	.144
NILAI			
Sig-F	0,000		
<i>Adjusted R²</i>	0,901		

Sumber : *Output SPSS V.15*

Berdasarkan tabel di atas, nilai uji koefisien determinasi memiliki nilai sig sebesar 0.000, maka dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, nilai *adjusted R²* sebesar 0.901, maka dapat disimpulkan 90,1 % variabel independen menjelaskan variabel dependen, dan sisanya 9,9 % dijelaskan variabel oleh variabel lain yang tidak di teliti pada penelitian ini.

Uji hipotesis 1 (H₁)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar $0,044 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,253. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama H₁ di terima.

Uji hipotesis 2 (H₂)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar $0,009 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,378. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua H₂ di terima.

Uji hipotesis 3 (H₃)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar $0,357 > 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,128. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga H₃ di tolak.

Uji hipotesis 4 (H₄)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar $0,048 <$

0,05 dengan koefisien sebesar 0,383. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat H_4 di terima.

Uji hipotesis 5 (H_5)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengawasan DPRD memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar $0,002 < 0,05$ dengan koefisien sebesar 0,430. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima H_5 di terima.

Uji hipotesis 6 (H_6)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar $0,144 > 0,05$ dengan koefisien sebesar -0,223. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam H_6 di tolak.

V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN PENELITIAN

Simpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.
2. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.
3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.
4. Implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.

5. Pengawasan DPRD berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*.
6. Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu :

1. Penelitian ini hanya dilakukan dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul saja sehingga belum terlihat secara menyeluruh aspek pelaksanaan *good governance* secara luas.
2. Kurangnya jurnal penelitian pengawasan DPRD dan budaya organisasi karena masih sedikit yang meneliti masalah ini terhadap penerapan *good governance*.
3. Penggunaan instrument kuesioner terkadang dapat menimbulkan bias penelitian, dikarenakan jawaban dari responden terkadang tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran untuk penelitian serupa yang akan datang sebagai berikut :

1. Menambah responden tidak hanya kepala organisasi perangkat daerah saja agar data yang didapatkan tidak terlalu sedikit, serta memperluas penelitian tidak hanya satu kabupaten saja melainkan beberapa kabupaten atau lingkup provinsi agar data yang didapatkan banyak sehingga bisa lebih memperkuat hasil penelitian.
2. Menambah wawasan dan mencari lebih banyak jurnal yang serupa dengan penelitian tersebut atau bisa menggunakan buku buku yang setopik dengan penelitian tersebut untuk menambah kekurangan jurnal.
3. Penelitian serupa mendatang diharapkan sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung untuk

mengumpulkan data penelitian sehingga pengisian kuesioner menjadi lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah siti, Karmizi, Enni savitri. 2014. "Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)." *Jom Fekon*, 1(17), 1–16.
- Ayu, I., & Suprayetno, A. 2008. "Pengaruh Motivasi Kerja , Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan (Studi kasus pada PT . Pei Hai International Wiratama Indonesia)." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10(1996), 124–135.
- Bakar, usman abu, Azlim, & Darwanis. 2012. "Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Dikota Banda Aceh." *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 1–14.
- Bantulkab.go.id. (n.d.). "Kabupaten Bantul."
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). *"Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD dan SKPKD (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi)." Jakarta: Salemba Empat.*
- Destriyani, V. 2015. "The effect of Good Governance, the Quality of Human Resources, and Information Technology Utilization Internal Control Performance Against Local Government Organisation (Studies in Regional Working Unit Kepulauan Meranti Government)." *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Dhiyayani, S. I. 2017. "Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, dan implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap penerapan good governance." *Faculty of Economic Riau University, vol.4 no.1*, 1859–1872.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance And Shareholder." *Australian Journal of Management*, 16.1(June 1991), 49–65.
- Ghozali, I. 2006. *"Analisis Multivariat dengan menggunakan SPSS."*
- Habibie. 2013. "Pengaruh Pengawasan Dprd, Pengendalian Internal, Dan Peran

Auditor Internal Terhadap *Good Governance* (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Solok),” *I*(1), 1–21. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/156>

Hartono Jogiyanto. 2016. “*Metodologi Penelitian Bisnis.*”

Kartika, F. 2017. “eprints.ums.ac.id.” Retrieved from eprints.ums.ac.id/55153/

Koesmono, T. 2005. “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kepuasan Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Sub Sektor Industri Pengolahan Kayu Skala Menengah Di Jawa Timur.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(2), 162–179.

Lestiawan, H. Y., & Jatmiko, B. 2015. “Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul).” *Maksimum*, 5(1), 32–49.

Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. 2017. “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan , Budaya Organisasi , Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah , Peran APIP , Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud),” (17), 82–94.

Malik, A. 2014. “Pengaruh Budaya Organisasi dan Loyalitas Kerja Dengan Intensi Turnover Pada Karyawan PT.Cipta Ganti Heavy Equipment Samarinda.” *eJournal Psikologi*, 2(1), 65–75.

Mardiasmo. 2004. “*Otonomi & manajemen daerah.*”

Mardiasmo. 2009. “*Akuntansi sektor publik.*”

Mulyadi. 2002. “*Auditing.*” Jakarta: Salemba Empat.

Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. 2017. “*Analisis Statistik Dengan SPSS.*” yogyakarta: Danisa Media.

Putri, A. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah,Penerapan STandar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *JOM*, 4(1).

Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Sujana, E. 2014. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance.” *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–11.

Ruspina, D. O. 2013. “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan

Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Penerapan Good Governance (Studi empiris pada Pemerintah Kota Padang),” (September), 1–27.

Salam, D. S. 2004. “*Manajemen Pemerintah Daerah.*”

Santoso, M. A. 2011. “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan,” *18*(4), 604–620.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2017. “*Metode penelitian Untuk Bisnis.*” jakarta selatan: Salemba Empat.

Sukmaningrum Tantriani. 2012. “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang).”

Suryo, P., & Jatmiko, B. 2017. “*Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah.*”

Syamsir, T. 2014. “Pengaruh peran inspektorat daerah dan budaya organisasi daerah terhadap penerapan good governance (Studi Empiris Pemerintah Kota Bukittinggi).” *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*

Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. 2013. “Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, 17*(1).

Trisnaningsih, S. R. I. 2007. “Independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman good governance, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor.” *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–56.

Tunggal, A. 2016. “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kepulauan Aru,” 22–48.

Wibowo, S. A. 2012. Pengaruh Personal *Background* , Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Dan *Political Culture* Terhadap. *Jurnal Akuntansi & Investasi, 12*(1), 44–52.

Wiratno, A., Pratiwi, U., & Nurhikmah. 2013. “Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Terhadap Penerapan Good Governance (Survey Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tegal).” *Jurnal. Vol 3, No 1 (2013): Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (SCA-3). Universitas Jenderal Soedirman., 1*(1), 1–8.

www.Bppkpd.id. (n.d.). “www.Bppkpd.id.” Retrieved from www.Bppkpd.id/bimtek-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp-oleh-Bpk/

Yusniyar, Darwanis, & Abdullah, S. 2016. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh).” *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 16.

Suryandari, E. 2015. Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern , Pemanfaatan Teknologi Informasi , dan Total Quality management Terhadap Penerapan *Good Governance* di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(2), 145–154. <https://doi.org/10.18196/JAI-2015.0039>.

Jefri, R. 2018. Teori stewardship dan *good governance*, *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.

